

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2023**



**KAPANEWON SEWON**

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sewon menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon. Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

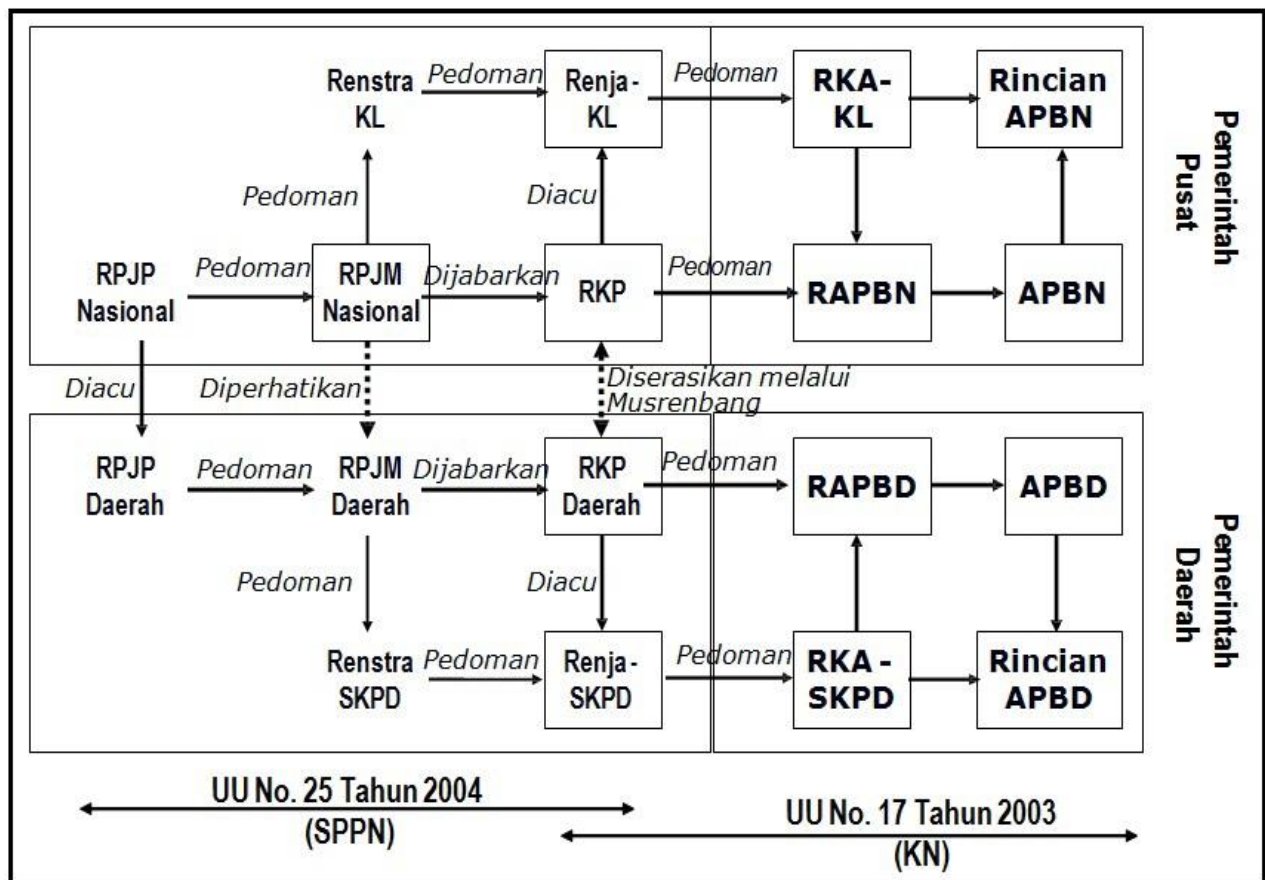
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
  - h. Peraturan Menteri ....\*\*) Nomor ....\*\*) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
  - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  - k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
  - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
  - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52 ); dan
  - r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Sewon Tahun

2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>90</b>	<b>80.52</b>	<b>89,47 %</b>
		Capaian nilai evaluasi kinerja	90	90	100 %
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai evaluasi kinerja	90 persen	90 persen	100 %
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100 %
		Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Dokumen Keuangan dan Aset	5 dokumen	5 dokumen	100 %
		Dokumne Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	90 persen	100 %
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	14 dokumen	14 dokumen	100 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan adminitrasi umum	100 persen	100 persen	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	100 %
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	100 %
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	20 jenis	20 jenis	100 %
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100 %
		penggandaan	25.617 lembar	25.617 lembar	100 %
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100 %
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	87 dokumen	87 dokumen	100 %
		perjalanan dinas dalam daerah	185 op	185 op	100 %
		perjalanan dinas luar daerah	0 op	0 op	0 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 %
4.1	Penyediaan Jasa Surat	Belanja Materai	180 lembar	180 lembar	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Menyurat				
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
		Belanja telepon	12 bulan	12 bulan	100 %
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan alat rumah tangga	1 jenis	1 jenis	100 %
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100 %
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan administrasi, petugas kebersihan)	5 ob	5 ob	100 %
		Pengelola Keuangan dan BMD	9 ob	9 ob	100 %
		Laporan petugas penyemprot disinfektan	1 ob	1 ob	100 %
		dokumen BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 %
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 9 motor)	10 unit	10 unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	10 unit	10 unit	100 %
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100 %
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 %</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah	100 persen	100 persen	100 %
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 persen	89,95	100,07%
2.1		Jenis layanan yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Masyarakat yang dilayani	36.000 orang	36.000 orang	100 %
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pembinaan sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 %</b>
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 %
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang sosial	6 dokumen	6 dokumen	100 %
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pendampingan kelompok usaha	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pendampingan lomba	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Promosi produk masyarakat	1 kali	1 kali	100 %
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Capaian Pemerintahan Umum kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 %</b>
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 %
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan pemantauan vaksin covid	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Laporan koordinasi FKDM	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
<b>V</b>	<b>ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>100 persen</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	0	0 %
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	100 persen	0	0 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.</b>	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Sewon untuk tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Hal ini karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, anggarannya digeser ke sub kegiatan lain. Dengan adanya perubahan anggaran yang meliputi perubahan target kinerja dan anggaran maka diharapkan pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja</b>	<b>Faktor Pendukung Keberhasilan</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.1	Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan



3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan pembayaran rekening jasa telepon dan listrik sesuai dengan perencanaan
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor

<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monografi dan rakor lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
4. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dan upaya penanganan kemiskinan.

#### **1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sewon yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon	70	80	84,57	89,15	90,99	89	89,95	
2.	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	100	-	-	-	-	
3.	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	101,05	100	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	102,27	100	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	80	85	105,56	65,29	100	21,43	

Keterangan:

\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sewon yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Yang melaksanakan program usulan hasil Musrenbang di tingkat Kapanewon adalah OPD di tingkat kabupaten, sehingga anggarannya tergantung di OPD yang bersangkutan.
  - b. Realisasi usulan Musrenbang tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu yaitu di tingkat Kabupaten.
2. IKU Kapanewon Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
    - a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon)
    - b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Target IKU nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon dapat tercapai karena pada pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan sikap tingkah laku pegawai yang melayani dengan baik.
- b. Target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dapat tercapai karena Kapanewon melakukan mendampingin dari proses perencanaan sampai dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di Kalurahan dan dilaksanakannya rapat koordinasi dan monitoring langsung ke Kalurahan .
- c. Target IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai karena diadakan evaluasi APBDes secara berkala yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMDes dan RKPDDes.

### **1.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di

Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
Ruangan kerja yang nyaman	Terdapat ruangan kerja yang tidak nyaman dan terbatas
Kerjasama antara ASN di kapanewon yang cukup kompak dan solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah ASN kapanewon yang terbatas

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
Semangat kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat	Dengan jumlah penduduk yang besar sehingga penyebaran wabah Covid-19 tinggi
Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk unggulan Kapanewon Sewon	Wilayah Kapanewon Sewon merupakan salah satu Kapanewon dengan tipe perkotaan karena yang letaknya berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta
Sebagai pintu jalur masuk arus lalu lintas untuk menuju obyek wisata di wilayah kabupaten Bantul, seperti obyek wisata pantai, pajimatan Imogiri dll	Jalur lalu lintas yang menjadi rawan kecelakaan dan macet.
Adanya koordinasi yang solid antar lembaga dan instansi terkait di wilayah Kapanewon Sewon	Daerah yang rawan terjadi tindak kriminal karena berbatasan dengan wilayah perkotaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sewon pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKAL
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Melaksanakan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor di wilayah Kapanewon Sewon.

#### **1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kapane won Sewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	66.040.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Kapane won Sewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 persen	66.040.000	
			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul	82 persen	50.000.000			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul	82 persen	50.000.000	
1	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	
1.1	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen							



2.	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	
1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang							
<b>II.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kapane won Sewon</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan</b>	<b>90 angka</b>	<b>3.412.825.241</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kapane won Sewon</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)</b>	<b>90 angka</b>	<b>3.412.825.241</b>	
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	6.972.500	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	5.900.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	5 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	3.500.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil evaluasi	5 dokumen	3.472.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	2.400.000	
			Dokumen keuangan	32 dokumen							

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	2.841.470.933	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah	90 persen	2.841.043.433	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	1.827.137.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.735.390.933	
			tunjangan ASN	12 kali	908.253.933						
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian	96 orang/bulan	106.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	103.252.500	
2.3						Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	22 laporan	2.400.000	
3						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian	90 persen	2.900.000	
3.1						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	2.900.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	198.196.886	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	201.796.886	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	7.196.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi	4 paket	7.196.500	

								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Atk	25 jenis	12.333.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.333.600	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	6.603.612	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	6.603.612	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	7 jenis	5.760.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	5.760.750	
			Penggandaan	15.000 lembar							
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1.300.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	65 dokumen	163.302.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 laporan	163.302.424	
			Perjalanan dinas dalam daerah	100 op							
			Perjalanan dinas luar daerah	3 op							
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.700.000	
4.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan	1 dokumen	3.600.000	

						Berbasis Elektronik pada SKPD		berbasis elektronik pada SKPD			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	42.347.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	42.347.000	
5.1	Pengadaan Mebel		Pengadaan meja kursi tamu	1 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	10.000.000	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	32.347.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	180.375.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	175.375.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Matera i dan benda pos		500 lembar	5.000.000						
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	40.000.000	
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	16.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 laporan	16.200.000	

6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen	45.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	119.175.600	
			Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	22.800.000						
			Laporan administrasi pelayaan umum	2 dokumen	45.600.000						
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN	12 bulan	5.175.600						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	143.462.322	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	143.462.322	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 Unit	119.249.650	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	119.249.650	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	1 Unit							
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit							
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.212.672	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	24.212.672	

III	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapane won Sewon	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 persen	60.215.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 persen	60.215.000	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90 persen	50.515.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90 persen	50.515.000	
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	18.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	18.000.000	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen Monografi Kecamatan	6 dokumen	32.515.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	32.515.000	
			Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	1 dokumen							
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4 dokumen							
			Laporan pendampingan keuangan desa	6 dokumen							
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 persen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	9.700.000	

2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan	2 laporan	9.700.000	
			Masyarakat yang dilayani	18.000 orang							
<b>IV.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan</b>	<b>Kapane won Sewon</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>89 persen</b>	<b>60.535.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan</b>		<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>89 persen</b>	<b>60.535.000</b>	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	85 persen	31.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 persen	31.500.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	16.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan	2 dokumen	16.000.000	
1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	15.500.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	16 dokumen	15.500.000	
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	29.035.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	91 persen	29.035.000	
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan	5 dokumen	29.035.000	Fasilitasi Pengembangan		Jumlah laporan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	29.035.000	

			pengembangan usaha masyarakat			Usaha Ekonomi Masyarakat					
<b>V.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kapane won Sewon</b>	<b>Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>164.154.692</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>100 persen</b>	<b>164.154.692</b>	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	164.154.692	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	164.154.692	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Laporan kejadian trantibum kapanewon	2 dokumen	6.212.328	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon	5 laporan	164.154.692	
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	2 dokumen	3.550.000						
			Laporan Penanggulangan Bencana	12 dokumen	154.392.364						
<b>VI.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum</b>	<b>Kapane won Sewon</b>	<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>76.390.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum</b>		<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 persen</b>	<b>76.390.000</b>	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	76.390.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	76.390.000	



1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sewon)		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	11 dokumen	76.390.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sewon)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	115 orang	76.390.000	
			laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan	n/a	0			laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan			

### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **1.9. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Pemulihan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat akibat imbas dari pandemi Covid19.
3. Mengoptimalkan penguatan SDM dan kelembagaan yang berbasis TI.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
5. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk menuju kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
6. Mempromosikan tempat wisata yang ada di wilayah Kapanewon Sewon.
7. Mempromosikan hasil kerajinan dan produksi industri kecil.

##### **1.10. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah

”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RenjaKapanewon Sewon Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90

## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target					
		si Pemerintah an (AKIP)		perangkat daerah						Alokasi Umum		si Pemerintah an (AKIP)						
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	5 Laporan	100 per sen	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	2.400.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>2.502.097.006</b>					<b>2.733.145.033</b>			
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan, barang, kepegawaia n dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	20 Orang/ bulan	90 pers en	2.451.337.006	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	2.682.385.033
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan, barang, kepegawaia n dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	3 Dokume n	90 pers en	48.360.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	48.360.000
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran, 1 CALK, 3 laporan Dana Keistiemwaan)	Capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan, barang, kepegawaia n dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	22 Lapora n	90 pers en	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	2.400.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>2.900.000</b>				<b>2.900.000</b>				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Adminitrasi Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengelolaa n administra su umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Dokume n	90 pers en	2.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Adminitrasi Pemerintah an (AKIP)	90 angka	2.900.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>149.203.712</b>			<b>239.733.886</b>		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Paket	100 pers en	4.065.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	7.196.500
7	1	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Paket	100 pers en	12.457.612	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	12.333.600
7	1	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Paket	100 pers en	6.602.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	16.603.612
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Paket	100 pers en	5.024.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	7.760.750
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	1 Dokume n	100 pers en	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	1.300.000
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	128 Lapora n	100 pers en	113.554.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	185.302.424
7	1	1	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaa n	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaa n administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	1 Dokume n	100 pers en	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Kinerja Pengelolaa n	90 angka	5.637.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
		Administra si Umum								Alokasi Umum		Administra si Umum						
7	1	1	2.0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelola administra si umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	1 Dokume n	100 per sen	3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	90 angka	3.600.000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>21.968.000</b>				<b>70.884.672</b>				
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Pengadaan meja kursi tamu, rak buku dan sekat ruangan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	3 unit	100 per sen	11.968.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	20.000.000
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	1 Unit	100 per sen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	50.884.672
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>180.309.900</b>				<b>191.200.000</b>				
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	12 Lapora n	100 per sen	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	50.000.000
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	4 Laporan	100 per sen	11.430.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra si Pemerintah an (AKIP)	90 angka	16.200.000
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	90 ang ka	5 Laporan	100 per sen	123.879.900	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Administra	90 angka	125.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
														si Pemerintahan (AKIP)	si Pemerintahan (AKIP)	Pagu Indikatif (Rp.)	
7	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>118.238.718</b>				<b>217.924.650</b>				
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	90 angka	10 Unit	100 persen	103.247.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	119.249.650
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggunharjo	90 angka	2 Unit	100 persen	14.990.918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	98.675.000
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>44.347.500</b>				<b>60.215.000</b>					
7	1	2	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>35.785.000</b>				<b>50.515.000</b>				
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	90 persen	11.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	18.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	90 persen	23.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	32.515.000
7	1	2	2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>					<b>8.562.500</b>				<b>9.700.000</b>				
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Cakupan kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	2 Laporan	100 persen	8.562.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	9.700.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target				
7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>106.735.000</b>				<b>120.535.000</b>				
7	1	3	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>68.075.000</b>				<b>51.500.000</b>				
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	89 Persen	12 Lembaga	85 persen	17.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	26.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	16 Laporan	85 persen	50.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	25.500.000
7	1	3	2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					<b>38.660.000</b>				<b>69.035.000</b>				
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capain Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 persen	6 Laporan	100 persen	38.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 persen	69.035.000
7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>170.875.000</b>				<b>212.904.692</b>				
7	1	4	7.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>170.875.000</b>				<b>212.904.692</b>				
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 persen	5 Laporan	100 persen	170.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	212.904.692
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>10.300.000</b>				<b>98.516.000</b>				
7	1	5	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					<b>10.300.000</b>				<b>98.516.000</b>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
														Pagu Indikatif (Rp.)			
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyeleng araan Pemerintah an Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyeleng araan pemerintah an umum	Kab. Bantul, Sewon, Semua Keluraha n	100 Per sen	115 Orang	100 per sen	10.300.000		Cakupan Stabilitas Penyeleng araan Pemerintah an Umum	100 Perse n	98.516.000
<b>TOTAL</b>										<b>3.459.396.836</b>				<b>4.119.898.933</b>			

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

